

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang dimulai pada akhir tahun 2019 telah membawa dampak yang luas dan mendalam pada berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan ekonomi internasional. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memiliki hubungan ekonomi yang erat dan saling bergantung satu sama lain. Kerjasama ekonomi antara kedua negara ini meliputi berbagai sektor seperti perdagangan, pariwisata, dan tenaga kerja. Namun, pandemi COVID-19 telah menguji kekuatan dan ketahanan dari hubungan ini, mengakibatkan berbagai tantangan dan perubahan yang signifikan. Artikel ini akan membahas secara rinci dampak pandemi COVID-19 terhadap kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia, dengan mengkaji berbagai sektor yang terpengaruh dan kebijakan yang diterapkan oleh kedua negara untuk mengatasi krisis ini.

Pandemi COVID-19 telah mengganggu arus perdagangan antara Indonesia dan Malaysia secara signifikan. Pembatasan mobilitas dan kebijakan lockdown yang diterapkan oleh kedua negara menyebabkan penurunan drastis dalam volume perdagangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dinonasih et al. (2023),



pembatasan transportasi internasional dan perdagangan yang diterapkan mengurangi penyebaran virus berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi di negara. Penutupan sementara kerja sama perdagangan internasional telah

menyebabkan gangguan besar pada sektor-sektor yang bergantung pada perdagangan lintas batas, termasuk ekspor dan impor. Penurunan volume perdagangan ini tidak hanya berdampak pada pendapatan negara tetapi juga pada sektor-sektor yang terkait dengan perdagangan internasional seperti logistik dan manufaktur (Dinonasih et al., 2023). Contohnya, sektor manufaktur di Indonesia yang sangat bergantung pada bahan baku dari Malaysia mengalami kelangkaan yang menyebabkan penurunan produksi.

Sejak awal pandemi, kebijakan pembatasan mobilitas dan lockdown yang diterapkan oleh banyak negara, termasuk Indonesia dan Malaysia, menyebabkan gangguan signifikan dalam rantai pasok global. Banyak industri yang terpaksa menghentikan atau mengurangi produksinya karena terbatasnya pasokan bahan baku dan komponen yang biasanya diperoleh melalui perdagangan internasional. Di Indonesia, sektor-sektor seperti manufaktur, tekstil, dan otomotif mengalami penurunan produksi yang drastis. Hal yang sama terjadi di Malaysia, di mana industri elektronik dan minyak sawit yang menjadi andalan ekspor negara tersebut turut terdampak (Biro Pusat Statistik Indonesia, 2020).

Pandemi COVID-19 yang mulai melanda pada awal tahun 2020 telah menyebabkan berbagai kebijakan pembatasan sosial dan ekonomi diimplementasikan oleh pemerintah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan Malaysia. Dampak pandemi terhadap perdagangan antara Indonesia dan Malaysia terlihat dari penurunan



ekspor dan impor. Menurut data dari Biro Pusat Statistik Indonesia, perdagangan bilateral antara kedua negara mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020. Volume ekspor Indonesia ke Malaysia menurun sekitar 15%, sementara impor

dari Malaysia juga mengalami penurunan yang hampir sama (Biro Pusat Statistik Indonesia, 2020). Produk-produk utama yang terdampak termasuk bahan kimia, elektronik, dan produk pertanian. Kebijakan-kebijakan ini, seperti lockdown dan pembatasan perjalanan, berdampak langsung pada aktivitas perdagangan dan investasi internasional. Di Indonesia, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pengetatan jalur transportasi internasional mengakibatkan penurunan tajam dalam aktivitas ekspor dan impor (Dinonasih et al., 2023). Dampak serupa juga terjadi di Malaysia, di mana penurunan aktivitas perdagangan internasional berakibat pada perlambatan ekonomi secara keseluruhan (Rajamoorthy, 2020).

Namun, meskipun mengalami penurunan, kedua negara berusaha untuk mempertahankan dan bahkan memperkuat kerja sama ekonomi mereka. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui implementasi Local Currency Settlement (LCS) yang memungkinkan transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada mata uang asing seperti dolar AS, tetapi juga memberikan stabilitas dalam transaksi perdagangan di tengah fluktuasi nilai tukar yang terjadi selama pandemi (Syifa, 2024).

Di bidang investasi, pandemi Covid-19 juga memberikan tantangan tersendiri. Banyak investor yang menunda atau membatalkan rencana investasi mereka karena ketidakpastian ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi. Di Indonesia, ketidakpastian

dan pembatasan aktivitas bisnis menyebabkan banyak investor menunda atau
lkan rencana investasi mereka (Astuti & Mahardhika, 2020). Malaysia juga



mengalami hal serupa, dengan sektor-sektor ekonomi utama seperti manufaktur dan perdagangan terdampak signifikan oleh pandemi (Eldaia et al., 2021).

Namun, Indonesia dan Malaysia berusaha untuk menarik kembali minat investor dengan menawarkan berbagai insentif dan kemudahan berbisnis. Pemerintah Indonesia, misalnya, mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus ekonomi dan reformasi regulasi untuk menarik investasi asing, termasuk dari Malaysia. Begitu pula dengan Malaysia yang memberikan berbagai insentif fiskal dan mempercepat proses perizinan investasi untuk menjaga arus masuk investasi ke negaranya (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2020).

Kerjasama lintas batas antara Indonesia dan Malaysia juga tidak luput dari dampak pandemi. Penelitian oleh Anuar dan Raharjo (2022) menunjukkan bahwa ancaman non-tradisional seperti pandemi COVID-19 menghambat implementasi kebijakan bilateral di wilayah perbatasan Tebedu-Entikong. Pandemi ini menghambat upaya integrasi ekonomi kedua negara di wilayah perbatasan, yang selama ini diupayakan melalui Komite Sosio-Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo). Studi ini menekankan pentingnya reformulasi kebijakan tata kelola lintas batas yang dapat menjamin keamanan nasional tanpa mengorbankan pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan (Anuar & Raharjo, 2022). Misalnya, kerjasama dalam perdagangan lintas batas dan mobilitas tenaga kerja harus disesuaikan dengan protokol



1 yang ketat untuk mencegah penyebaran virus sekaligus memastikan
n aktivitas ekonomi.

Kerja sama dalam mengatasi dampak pandemi juga terlihat dari berbagai inisiatif bilateral yang dilakukan oleh kedua negara. Indonesia dan Malaysia aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional dan regional seperti ASEAN untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Kedua negara juga menjalin kerjasama dalam penyediaan alat kesehatan dan vaksin. Misalnya, Malaysia memberikan dukungan kepada Indonesia dalam bentuk bantuan alat kesehatan, sementara Indonesia berkomitmen untuk memastikan pasokan bahan baku farmasi untuk kebutuhan produksi vaksin di Malaysia (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2020).

Selain itu, kedua negara juga memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat kerja sama ekonomi selama pandemi. Perdagangan digital dan adopsi teknologi informasi menjadi salah satu strategi utama untuk menjaga arus perdagangan dan investasi tetap berjalan. Misalnya, peningkatan penggunaan platform perdagangan elektronik membantu mengurangi dampak negatif dari pembatasan fisik dan mempercepat pemulihan ekonomi (Jingyi et al., 2021).

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Gangguan besar terjadi di sektor perdagangan, pariwisata, dan tenaga kerja, menunjukkan kerentanan hubungan ekonomi bilateral terhadap krisis global seperti pandemi. Krisis ini tidak hanya mengguncang stabilitas

kedua negara tetapi juga menantang efektivitas kebijakan yang telah n sebelumnya. Namun, respons kebijakan yang cepat dan tepat dari kedua erhasil membantu mengurangi dampak negatif serta mendukung proses



pemulihan ekonomi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kerjasama yang erat dan strategi kebijakan yang adaptif memungkinkan Indonesia dan Malaysia untuk kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi yang positif. Untuk menghadapi tantangan baru dan memanfaatkan peluang dari perubahan dinamika global pasca-pandemi, kedua negara perlu terus berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang inovatif, responsif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana pandemi COVID-19 memengaruhi kerjasama ekonomi kedua negara, serta langkah-langkah strategis yang diambil untuk mendukung pemulihan. Dengan demikian, judul penelitian yang dipilih adalah: **“Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kerjasama Ekonomi Indonesia – Malaysia”**.

1.2. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, Penulis akan membatasi cakupan kajian dengan berfokus pada topik yang diangkat dalam judul, yaitu dampak pandemi COVID-19 serta implikasinya terhadap hubungan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, Penulis merumuskan dua permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak Pandemi Covid-19 terhadap kerja sama ekonomi Indonesia-Malaysia pada bidang perdagangan dan investasi?



Bagaimana Kerja sama Indonesia-Malaysia dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19 pada bidang perdagangan dan investasi?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh Penulis, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui dampak Pandemi Covid-19 terhadap kerja sama ekonomi Indonesia-Malaysia pada bidang perdagangan dan investasi.
2. Untuk mengetahui Kerja sama Indonesia-Malaysia dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19 pada bidang perdagangan dan Investasi.

1.4. Kerangka Konseptual

Penelitian ini didasarkan pada berbagai teori dan konsep yang relevan untuk memahami dampak pandemi COVID-19 terhadap kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Kerangka konseptual ini akan memberikan landasan teoretis yang kuat dalam menganalisis berbagai aspek dari hubungan ekonomi bilateral kedua negara dalam konteks pandemi. Teori dan konsep yang digunakan meliputi Interdependensi Ekonomi, Tata Kelola Global (*Global Governance Theory*), Kepentingan Nasional, dan Kerjasama Ekonomi. Masing-masing teori ini akan diuraikan untuk menjelaskan bagaimana mereka memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami dinamika kerjasama ekonomi di masa krisis global seperti pandemi.

1. Interdependensi Ekonomi

Teori Interdependensi Kompleks, yang dikembangkan oleh Robert Ohane dan Joseph Nye, menekankan pentingnya saling ketergantungan antara para-negara dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, dan sosial.



Teori ini relevan untuk penelitian ini karena menggambarkan bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi hubungan saling bergantung antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam konteks kerjasama ekonomi. Keohane dan Nye (1977) menyatakan bahwa dalam dunia modern, interaksi antar negara tidak hanya didorong oleh kekuatan militer tetapi juga oleh hubungan ekonomi dan sosial yang kompleks (Keohane & Nye, 1977).

Dalam pandemi, saling ketergantungan ini menjadi semakin nyata ketika gangguan ekonomi di satu negara dapat berdampak signifikan pada negara lainnya. Studi oleh Ripsman (2004) menambahkan bahwa interdependensi ekonomi dapat menjadi alat untuk meningkatkan stabilitas dan kerjasama, karena negara-negara yang saling bergantung akan lebih cenderung untuk bekerja sama demi mencapai stabilitas ekonomi (Ripsman, 2004). Selain itu, Moravcsik (1997) menemukan bahwa integrasi ekonomi yang dalam dapat mengurangi potensi konflik dan memperkuat hubungan kerjasama antara negara-negara, karena keterikatan ekonomi menciptakan insentif untuk mempertahankan hubungan yang harmonis (Moravcsik, 1997).

Menurut Hilmiyah et al. (2022), pandemi menyebabkan penurunan standar hidup dan kesejahteraan sosial-ekonomi di kedua negara, serta mempengaruhi kebijakan stimulus ekonomi yang diambil untuk mengembalikan kesejahteraan sosial-ekonomi ke jalur yang benar (Hilmiyah et al., 2022). Olivia et al. (2020) menemukan bahwa respon kebijakan pemerintah Indonesia terhadap krisis kesehatan dan ekonomi akibat COVID-19 penting dalam menjaga kestabilan



ekonomi (Olivia et al., 2020). Selain itu, Nursjanti dan Amaliawiati (2021) mencatat bahwa pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi dinamika ekonomi Indonesia, termasuk sektor UKM dan pariwisata, yang berkaitan erat dengan Malaysia (Nursjanti & Amaliawiati, 2021).

Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa teori Interdependensi Kompleks memberikan landasan untuk memahami bagaimana Indonesia dan Malaysia, sebagai negara yang memiliki hubungan ekonomi yang kuat, saling mempengaruhi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi telah menunjukkan bagaimana gangguan ekonomi di satu negara dapat memiliki dampak signifikan pada negara lain yang terkait erat secara ekonomi. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana saling ketergantungan ini mempengaruhi kebijakan dan strategi ekonomi kedua negara dalam menghadapi pandemi, serta bagaimana kerjasama ekonomi dapat membantu memitigasi dampak negatif dari krisis global ini.

2. Tata Kelola Global (*Global Governance Theory*)

Teori tata kelola global (*global governance theory*) mengacu pada sistem di mana berbagai aktor, termasuk negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan organisasi non-pemerintah, berkolaborasi untuk mengelola isu-isu global yang melintasi batas negara. Teori ini berusaha menjelaskan

bagaimana pengaturan dan regulasi global dapat dilakukan secara efektif tanpa adanya pemerintahan dunia tunggal. Michael Zürn adalah salah satu tokoh kunci dalam pengembangan teori ini. Dalam bukunya "A Theory of Global



Governance," Zürn menekankan pentingnya legitimasi, otoritas, dan kontestasi dalam tata kelola global (Barnett, 2020).

Teori tata kelola global bukan hanya tentang pengaturan formal oleh organisasi internasional, tetapi juga melibatkan proses sosial yang lebih luas yang mencakup aktor-aktor non-negara dan dinamika kekuasaan yang kompleks. Regulasi global terjadi melalui jaringan hubungan yang saling terkait dan proses interaksi sosial yang dinamis. Legitimasi dan otoritas dalam tata kelola global sering kali dipertanyakan dan ditantang oleh berbagai aktor, yang mengarah pada kebutuhan akan legitimasi yang lebih besar dan perubahan dalam struktur tata kelola global (Barnett, 2020).

Teori tata kelola global memberikan kerangka untuk memahami bagaimana Indonesia dan Malaysia dapat bekerjasama untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Pandemi menunjukkan bahwa masalah global memerlukan solusi yang juga bersifat global, di mana kerjasama lintas batas dan kolaborasi antara berbagai aktor menjadi sangat penting. Tata kelola global membantu menjelaskan bagaimana kedua negara dapat bekerja sama dengan organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengelola krisis dan memulihkan ekonomi. Keterlibatan dalam forum internasional seperti ASEAN untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan pandemi dan pemulihan

nomi adalah contoh nyata dari penerapan prinsip-prinsip tata kelola global (Bretos & Tallberg, 2020).



Tata kelola global juga mencakup peran penting aktor non-negara, seperti perusahaan multinasional dan organisasi non-pemerintah, dalam mengatasi tantangan global. Dalam konteks pandemi, perusahaan farmasi dan organisasi kesehatan global berperan penting dalam pengembangan dan distribusi vaksin. Tata kelola global memungkinkan berbagai aktor ini untuk berkoordinasi dan berbagi sumber daya guna mencapai tujuan bersama, seperti pengendalian penyebaran virus dan pemulihan ekonomi (Halliday, 2000).

Dengan memahami teori tata kelola global, evaluasi dapat dilakukan mengenai bagaimana Indonesia dan Malaysia dapat bekerjasama secara efektif dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi. Kolaborasi lintas batas, partisipasi dalam organisasi internasional, dan keterlibatan aktor non-negara adalah elemen penting dari tata kelola global yang dapat membantu kedua negara menghadapi tantangan yang timbul akibat krisis global ini.

3. Kerjasama Ekonomi

Kerjasama Ekonomi adalah konsep yang mencakup berbagai bentuk kolaborasi antara negara-negara untuk mencapai tujuan ekonomi bersama. Konsep ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana Indonesia dan Malaysia bekerja sama untuk memitigasi dampak ekonomi dari pandemi dan memperkuat hubungan bilateral mereka di masa depan. Menurut Oye (1986), kerjasama ekonomi antar negara dapat dicapai melalui negosiasi dan yusunan kebijakan bersama yang saling menguntungkan (Oye, 1986).



Kerjasama ekonomi menjadi penting dalam konteks pandemi karena negara-negara perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan global yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara. Milner (1992) menemukan bahwa kerjasama ekonomi seringkali didorong oleh kebutuhan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mengatasi masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara (Milner, 1992). Selain itu, Keohane (1984) menunjukkan bahwa institusi internasional dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerjasama ekonomi dengan menyediakan kerangka kerja dan aturan yang jelas (Keohane, 1984).

Hilmiyah et al. (2022) mencatat bahwa mitigasi pandemi di Indonesia dan Malaysia melibatkan kebijakan stimulus ekonomi yang berbeda, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing (Hilmiyah et al., 2022). Suryahadi et al. (2020) menekankan bahwa kebijakan perlindungan sosial di Indonesia perlu diperluas untuk mengatasi dampak pandemi yang parah terhadap tingkat kemiskinan (Suryahadi et al., 2020). Abao (2020) menemukan bahwa pandemi mempengaruhi migrasi lintas batas antara Indonesia dan Malaysia, mengakibatkan penurunan volume migrasi dan perubahan kondisi sosial-ekonomi di wilayah perbatasan (Abao, 2020).

Dalam penelitian ini, konsep Kerjasama Ekonomi akan digunakan untuk menganalisis bagaimana Indonesia dan Malaysia bekerja sama untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan global.

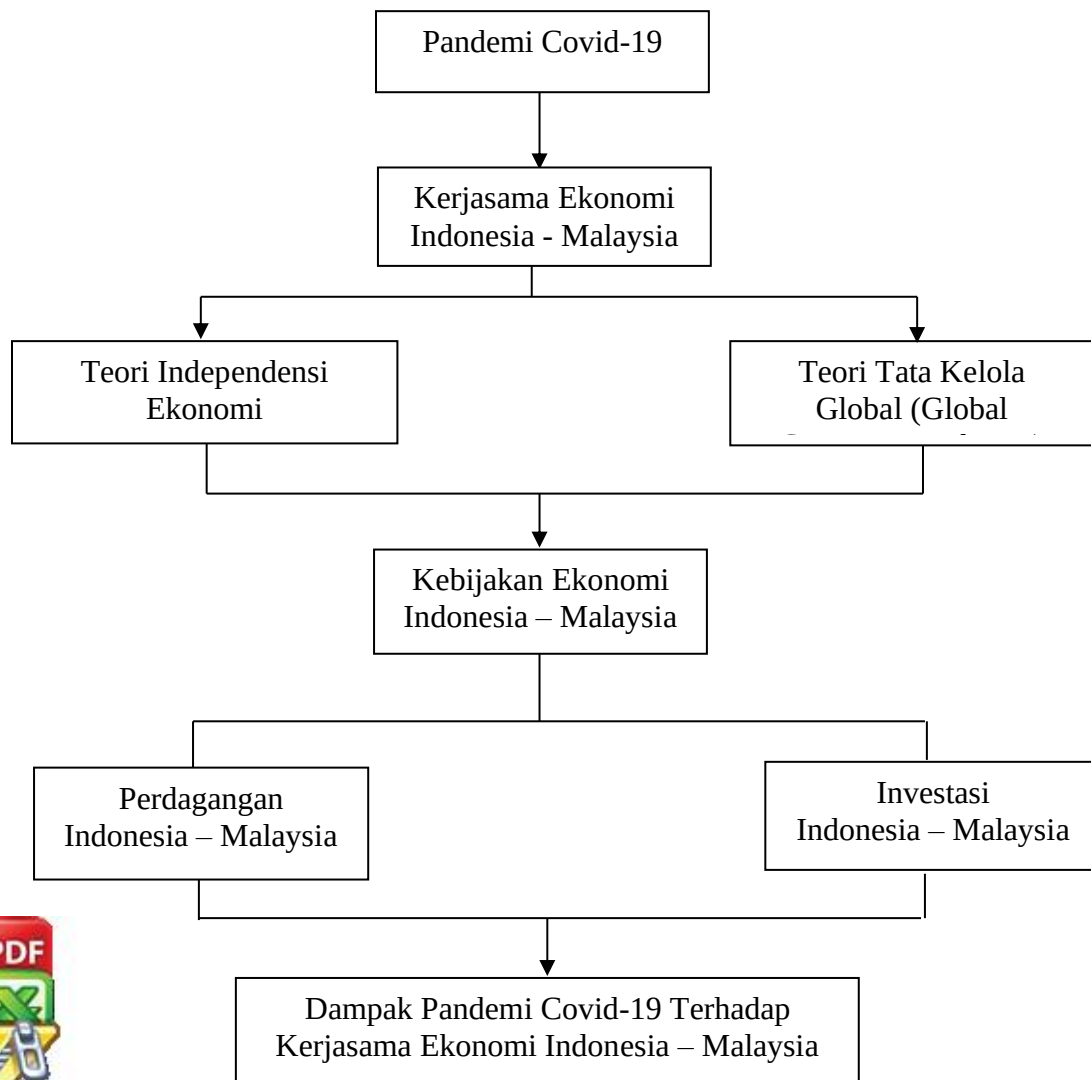


Penelitian ini akan mengeksplorasi bentuk-bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh kedua negara, serta kebijakan dan strategi yang diterapkan untuk memperkuat hubungan bilateral mereka di masa depan. Fokus utama akan berada pada upaya untuk memitigasi dampak negatif dari pandemi melalui kolaborasi dan koordinasi kebijakan ekonomi yang efektif.

1.5. Skema Kerangka Konseptual Penulisan

Penelitian ini berupaya untuk memahami dampak pandemi COVID-19 terhadap kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia melalui skema kerangka konseptual yang komprehensif. Kerangka ini didasarkan pada beberapa teori dan konsep utama yang saling melengkapi, yaitu Interdependensi Ekonomi, Tata Kelola Global (*Global Governance Theory*), dan Kerjasama Ekonomi. Skema ini akan membantu mengorganisir analisis tentang bagaimana kedua negara merespons dan beradaptasi terhadap tantangan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi, serta bagaimana kebijakan yang diterapkan dapat mempengaruhi hubungan bilateral. Dengan menggunakan kerangka konseptual ini, penelitian bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam dan terstruktur tentang dinamika kerjasama ekonomi di masa krisis global, serta mengeksplorasi strategi yang efektif untuk memitigasi dampak negatif dan memperkuat kerjasama ekonomi antara kedua negara.





Bagan 1. Alur Berpikir

Skema kerangka konseptual ini menjelaskan bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Di pusat skema adalah pandemi COVID-19, yang berdampak besar pada hubungan ekonomi kedua negara, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi. Untuk memahami dampaknya, skema ini menggunakan dua teori utama: Teori Interdependensi Ekonomi dan Teori Tata Kelola Global. Kedua teori ini memberikan pandangan yang berbeda tentang bagaimana pandemi mempengaruhi dinamika kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.

Dari sudut pandang Teori Interdependensi Ekonomi, skema ini menunjukkan bahwa kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia sangat dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan mereka satu sama lain. Karena kedua negara saling bergantung dalam hal perdagangan dan investasi, gangguan seperti pandemi dapat menyebabkan dampak yang luas. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh kedua negara sangat penting untuk mengurangi dampak negatif pandemi pada perdagangan dan investasi.

Skema ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia-Malaysia menjadi kunci



menghubungkan teori interdependensi dengan dampak nyata pada perdagangan dan investasi.

Selain itu, dari sudut pandang Teori Tata Kelola Global, skema ini menyoroti pentingnya kerjasama internasional dan regional dalam mengelola dampak pandemi. Melalui forum seperti ASEAN dan kerjasama bilateral, kedua negara bekerja sama untuk mengatasi tantangan pandemi. Teori Tata Kelola Global membantu menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi Indonesia dan Malaysia tidak hanya fokus pada masalah dalam negeri tetapi juga melibatkan koordinasi dengan negara lain. Skema ini menunjukkan bahwa dampak pandemi terhadap kerjasama ekonomi Indonesia dan Malaysia tidak hanya pada penurunan perdagangan dan investasi, tetapi juga pada adaptasi kebijakan ekonomi yang dilakukan untuk mengatasi krisis global ini.

1.6. Metode Penulisan

Metode penelitian memiliki beberapa elemen penting yang membentuk struktur penulisan agar tersusun dengan baik. Bagian ini akan menjelaskan secara rinci mengenai struktur metode penelitian yang diterapkan oleh penulis.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam yang tidak dapat diberikan oleh metode kuantitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami lebih dalam cara pandang dan persepsi individu terhadap dunia di sekitarnya (Suyitno, 2018).

Fokus dari penelitian kualitatif adalah untuk mengeksplorasi fenomena atau salah secara detail dan holistik. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kriptif digunakan untuk menggambarkan masalah atau fenomena secara rat. Penelitian deskriptif kualitatif ini tidak hanya menggambarkan fenomena



tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan dan konteks yang melingkupi fenomena tersebut.

2. Jenis Data

Penelitian ini mengandalkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti lain atau instansi lain dan kemudian digunakan kembali untuk tujuan penelitian ini. Sumber data sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal, dokumen resmi, undang-undang negara, situs web resmi, dan sumber elektronik lainnya yang memiliki kredibilitas tinggi. Data sekunder dipilih karena lebih mudah diakses dan memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang luas dan komprehensif tentang topik yang sedang diteliti. Penggunaan data sekunder juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan hasil penelitian dengan penelitian lain yang relevan dan memperkuat validitas temuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini bisa berupa catatan peristiwa masa lalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya seni dari individu atau instansi yang relevan. Teknik ini

ilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang a dan mendalam dari berbagai perspektif. Melalui studi kepustakaan, peneliti



dapat mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan memahami konteks historis dan teoretis dari topik yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, mengikuti model analisis data yang diusulkan oleh Miles dan Huberman (1992, dalam Ahmad Rijali, 2018). Model ini mencakup empat tahapan utama:

a. Reduksi Data

Tahap ini melibatkan proses seleksi, pengelompokan, pengarahannya, dan pengorganisasian data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan dan memfokuskan data agar lebih mudah dianalisis. Selama proses ini, informasi yang relevan dipilih dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat diverifikasi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa hanya data yang relevan dan signifikan yang digunakan dalam analisis.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif. Data disajikan menggunakan berbagai alat visual seperti matriks, bagan, dan grafik. Alat-alat ini membantu mengorganisir data dan menyajikannya dengan cara yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Penyajian data yang baik memungkinkan peneliti untuk melihat pola dan hubungan dalam data, serta membantu dalam menarik kesimpulan yang akurat dan valid.



c. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah proses yang digunakan untuk mengonfirmasi kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber data. Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti observasi, dokumen tertulis, catatan resmi, dan dokumen lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif dan mendalam tentang topik yang diteliti. Triangulasi membantu meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian dengan memastikan bahwa informasi yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari proses analisis data. Hasil dari penelitian harus diuji kebenarannya, kecocokannya, dan kekokohnya. Kesimpulan yang ditarik harus didasarkan pada analisis yang teliti dan mendalam, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini, peneliti meninjau kembali seluruh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dibuat benar-benar mencerminkan temuan penelitian. Kesimpulan akhir harus memberikan jawaban yang jelas dan tepat terhadap pertanyaan penelitian serta menyumbangkan wawasan baru yang bermanfaat bagi bidang studi yang bersangkutan.



Dengan struktur yang terorganisir ini, penelitian dapat disusun secara sistematis dan menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Struktur metode penelitian ini membantu memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penelitian dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan standar ilmiah.

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis sesuai dengan pedoman penulisan ilmiah. Berikut penyusunan antar sub bab nya yaitu:

BAB I Pendahuluan yaitu menguraikan konteks penelitian dengan lima sub bab. Pertama, Latar Belakang Masalah menjelaskan konteks dan pentingnya topik penelitian ini. Kedua, Batasan dan Rumusan Masalah menetapkan ruang lingkup serta pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Ketiga, Tujuan dan Manfaat Penelitian menyebutkan tujuan penelitian dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini bagi berbagai pihak. Keempat, Kerangka Konsep menyajikan konsep-konsep utama yang menjadi dasar penelitian. Kelima, Metodologi Penelitian menjelaskan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Terakhir, Sistematika Penulisan menguraikan struktur keseluruhan dari penulisan ini.

BAB 2 Tinjauan Pustaka yaitu menguraikan konsep dan teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Teori-teori yang dibahas meliputi Interdependensi Ekonomi, yang menyoroti hubungan saling ketergantungan antara negara; Tata Kelola Kepentingan Nasional (National Interest), yang membahas motivasi ekonomi dalam kebijakan luar negeri; serta Kerjasama Ekonomi, yang menguraikan dasar-dasar kerjasama ekonomi internasional.



BAB 3 Gambaran Umum yaitu memberikan penjelasan menyeluruh mengenai hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia sebelum dan selama pandemi COVID-19. Penulis juga menggambarkan dampak pandemi terhadap kedua negara, baik dari sisi ekonomi maupun aspek-aspek lainnya, memberikan konteks historis dan situasional yang relevan.

BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian yaitu berisi analisis mendalam tentang bagaimana kedua negara merespons pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap kerjasama ekonomi bilateral. Penulis akan mengevaluasi kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi pandemi, serta implikasinya terhadap kerjasama ekonomi. Analisis ini akan didukung oleh data dan bukti empiris yang relevan.

BAB 5 Kesimpulan yaitu menyajikan pernyataan pamungkas dari keseluruhan hasil penelitian. Bab ini merangkum temuan utama, menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan ini akan membantu menyusun pandangan yang lebih jelas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Interdependensi Ekonomi

Teori interdependensi, yang pertama kali diperkenalkan oleh Thibaut dan Kelley pada tahun 1959 dalam buku mereka "The Social Psychology of Groups", menggambarkan bagaimana ketergantungan antar individu beroperasi dalam berbagai konteks seperti konflik dan resolusinya, atribusi, emosi, kepercayaan, komunikasi, motivasi, dan interaksi sosial. Teori ini berfokus pada pengaruh interaksi sosial terhadap hubungan antar individu. Menurut teori ini, berbagai emosi dan motivasi yang dialami manusia dapat dilacak asalnya dari interaksi sosial yang telah terjadi di masa lalu atau yang diantisipasi akan terjadi di masa depan (Fauziyyah & Paksi, 2023).

Saat ini, banyak negara berkembang berupaya memperkuat kemampuan dan kompetensi mereka sehingga dapat mengubah kondisi dari ketergantungan menjadi saling ketergantungan. Negara-negara tersebut melakukan transformasi dari ketergantungan pada negara maju menjadi ketergantungan timbal balik dalam kerjasama ekonomi yang seimbang, yang saling melengkapi dan saling membutuhkan di antara satu negara dengan negara lainnya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara biasanya bertujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Untuk mencapai

ialah satu strategi yang diambil adalah melalui kerjasama dengan negara lain,



sehingga membentuk hubungan kerjasama yang membuat setiap negara terlibat menjadi saling tergantung satu sama lain (Fauziyyah & Paksi, 2023).

Konsep interdependensi menggambarkan bahwa negara-negara tidak sepenuhnya independen, melainkan saling membutuhkan dan saling mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan internasional. Hubungan timbal balik antar negara ini menghasilkan transaksi internasional, termasuk perdagangan barang dan jasa, aliran keuangan, serta pertukaran pesan komunikasi yang melintasi batas-batas negara. Setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh suatu pihak akan memiliki dampak terhadap pihak lain, yang mana seringkali ditandai dengan adanya kerja sama atau kompetisi antarnegara (Fauziyyah & Paksi, 2023).

Teori interdependensi, yang berakar pada prinsip-prinsip liberalisme, menegaskan bahwa ketergantungan timbal balik merupakan bagian intrinsik dari kondisi manusia. Tokoh liberalisme klasik, Adam Smith, memperkenalkan konsep ini melalui karya-karyanya di bidang ekonomi, menyarankan bahwa masyarakat dan negara yang saling bergantung secara alami cenderung menjalin kerjasama daripada konflik. Pandangan ini kemudian berkembang dalam liberalisme, yang menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi bisa mendorong negara-negara untuk bekerja sama, sehingga mengurangi kemungkinan konflik atau perang. Dominasi teori interdependensi dalam praktik dan analisis hubungan internasional meningkat tajam

akhirnya perang dingin (Fauziyyah & Paksi, 2023).

Salah satu bentuk yang paling dasar, interdependensi dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu sistem sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Dalam konteks



ilmu sosial, analisis mengenai dependensi sering kali mengkaji pengaruh aktivitas kelompok sosial sebagai faktor eksternal tersebut. Interdependensi merefleksikan hubungan ketergantungan mutual antar aktor sosial. Dengan definisi tersebut, interdependensi terkait erat dengan jenis tindakan spesifik dalam konteks isu tertentu (Morse dalam Carlsnaes dkk., 2021). Perbedaan antara berbagai jenis aktor sosial yang berperan sebagai faktor eksternal ini menjelaskan dua penyebab utama interdependensi dalam hubungan internasional. Di satu sisi, ada ketergantungan negara dan masyarakat nasional terhadap kegiatan di negara lain (Interdependensi antar negara). Di sisi lain, pemahaman mengenai perkembangan ekonomi dan masyarakat nasional tidak lengkap tanpa mempertimbangkan dinamika yang terjadi di negara lain (Carlsnaes dkk., 2021).

Teori interdependensi ekonomi menggambarkan bagaimana negara-negara saling bergantung satu sama lain dalam berbagai aspek ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi lainnya. Konsep ini menunjukkan bahwa tidak ada negara yang sepenuhnya mandiri secara ekonomi, dan kesejahteraan suatu negara sangat bergantung pada hubungannya dengan negara lain. Dalam perdagangan internasional, misalnya, negara-negara mengekspor barang yang mereka produksi dengan efisien dan mengimpor barang yang mereka produksi dengan kurang efisien, yang secara keseluruhan meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan global (Cottier & Shingal, 2021).



a pemikir teori Interdependensi Ekonomi bersepakat bahwa ketika negara-emiliki ikatan dan saling ketergantungan ekonomi, perdamaian lebih mudah. Keyakinan ini berakar pada pertimbangan biaya kesempatan yang terlibat.

Menurut Rosecrance dan Keohane & Nye dalam Triantama (2020), ketika suatu negara berada dalam kondisi saling ketergantungan yang mendatangkan berbagai keuntungan atau manfaat, negara tersebut akan cenderung menghindari perang. Alasan utamanya adalah adanya risiko kehilangan manfaat ekonomi. Gartzke, Li, dan Boehmer dalam Triantama (2020) menambahkan bahwa negara-negara akan menghindari penggunaan kekerasan atau perang dalam menyelesaikan konflik karena potensi "hukuman" dari para pelaku pasar. Pasar akan cenderung meninggalkan negara yang lebih memprioritaskan hasrat politiknya daripada keuntungan ekonomi yang dapat dinikmati oleh lebih banyak pihak (Triantama, 2020) .

Teori interdependensi ekonomi menggarisbawahi bagaimana negara-negara saling bergantung dalam berbagai aspek ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan tenaga kerja. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 telah memberikan dampak signifikan terhadap hubungan ekonomi internasional, termasuk kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dua negara ini memiliki hubungan ekonomi yang erat, dengan interaksi yang melibatkan perdagangan barang dan jasa, investasi langsung asing (FDI), serta migrasi tenaga kerja.

Sebelum pandemi, Indonesia dan Malaysia menikmati hubungan perdagangan yang saling menguntungkan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Department of Statistics Malaysia, perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Namun, pandemi menyebabkan gangguan dalam rantai pasok global dan pembatasan mobilitas, yang berdampak pada perdagangan antara Indonesia dan Malaysia. Penutupan perbatasan dan



pembatasan logistik mengakibatkan penurunan ekspor dan impor barang. Sebagai contoh, ekspor kelapa sawit Indonesia ke Malaysia mengalami penurunan akibat gangguan produksi dan distribusi (UN Comtrade, 2020).

Investasi langsung asing antara Indonesia dan Malaysia juga mengalami penurunan selama pandemi. Investasi dari Malaysia di sektor perkebunan dan manufaktur di Indonesia, serta investasi Indonesia di sektor keuangan dan jasa di Malaysia, menghadapi tantangan karena ketidakpastian ekonomi dan penurunan kepercayaan investor. Data dari Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia menunjukkan adanya penurunan aliran FDI selama tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penundaan proyek investasi dan perubahan prioritas perusahaan dalam menghadapi krisis.

Tenaga kerja merupakan aspek penting dalam hubungan ekonomi kedua negara. Sebelum pandemi, ribuan pekerja migran Indonesia bekerja di berbagai sektor di Malaysia, termasuk perkebunan, konstruksi, dan jasa. Pandemi COVID-19 menyebabkan pembatasan pergerakan manusia yang ketat, baik domestik maupun internasional. Banyak pekerja migran Indonesia terjebak di Malaysia tanpa pekerjaan atau dukungan yang memadai, sementara pengiriman tenaga kerja baru terhenti (IOM, 2021). Hal ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan pekerja, tetapi juga ekonomi kedua negara yang saling bergantung pada tenaga kerja migran.



demdi COVID-19 juga memaksa perusahaan dan pemerintah di kedua negara beradaptasi dengan teknologi baru dan inovasi dalam operasional bisnis dan publik. Penyebaran teknologi digital, seperti *e-commerce*, *fintech*, dan

layanan kesehatan digital, meningkat pesat selama pandemi. Kerjasama dalam pengembangan teknologi dan inovasi menjadi semakin penting untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Inisiatif seperti program digitalisasi UMKM di Indonesia dan Malaysia menunjukkan potensi besar untuk memperkuat interdependensi ekonomi melalui teknologi (World Bank, 2021).

2.2.Kerjasama Bilateral

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan bersama oleh beberapa pihak. Definisi ini menekankan sikap kesediaan untuk bekerja sama tanpa mempertimbangkan latar belakang individu yang terlibat, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Ketika konsep ini diterapkan dalam konteks yang lebih luas, seperti hubungan antar negara, hal ini disebut sebagai kerjasama internasional.

Kerjasama internasional merupakan hubungan antarnegara yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan negara-negara yang terlibat. Definisi ini menunjukkan bahwa kerjasama internasional adalah kondisi di mana berbagai pihak bersepakat untuk berkolaborasi dalam rangka menciptakan keuntungan baru bagi setiap peserta, keuntungan yang tidak dapat diraih melalui tindakan sepihak dan dengan mengorbankan biaya tertentu (Lu dkk., 2021).

Sejumlah besar pakar fokus dalam membahas kerjasama internasional melalui angka kelembagaan seperti aliansi, hukum laut, upaya mitigasi lingkungan, bagi untuk mengurangi konflik antarnegara. Berdasarkan studi yang dilakukan



oleh Lipson dalam Putri & Maâ (2019), diketahui bahwa negara-negara cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar untuk berkolaborasi dan menginstitutionalisasi kerjasama dalam bidang ekonomi dibandingkan dengan aspek keamanan. Keohane dalam Putri & Maâ (2019) menggambarkan pendekatan liberal institusional yang menekankan peran lembaga internasional dalam memfasilitasi kerjasama di antara negara-negara, khususnya dalam mengatasi isu-isu ekonomi dan keamanan. Beranjak dari itu, pada tahun 2000-an, Haim dalam Putri & Maâ (2019) meneliti bagaimana jaringan aliansi mempengaruhi pola perdagangan antarnegara. Penelitiannya lebih condong pada penggunaan metode empiris untuk menganalisis perdagangan internasional.

Meskipun Teori Kerjasama Internasional (International Cooperation Theory, ICT) umumnya mendefinisikan kerjasama internasional dalam konteks negara, ICT juga mengakui peran penting dari aktor-aktor lain seperti organisasi antar pemerintah (Intergovernmental Organizations, IGO) dan organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organizations, NGO). Thomas Schelling, yang merupakan pelopor pendekatan strategis dalam kerjasama internasional, mengutarakan dalam kata pengantar bukunya, "The Strategy of Conflict", bahwa tujuannya adalah membantu mengembangkan sebuah bidang interdisipliner yang saat itu dikenal dengan berbagai nama seperti 'teori tawar-menawar', 'teori konflik', atau 'teori strategi'. Schelling

bidang ini akan berkembang lebih lanjut, meskipun perkembangannya tidak sat dan bidang tersebut belum memiliki nama khusus yang dikenal luas (Dai 0).



Kerjasama internasional umumnya mencakup berbagai sektor seperti politik, sosial, pertahanan dan keamanan, kebudayaan, serta ekonomi. Setiap negara mengarahkan kerjasama ini berdasarkan kebijakan luar negeri yang mereka anut, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan dan memenuhi kepentingan nasional mereka di panggung global. Kerja sama ekonomi internasional dapat dikategorikan ke dalam empat jenis utama berdasarkan cakupannya. Pertama, kerjasama bilateral, yang melibatkan dua negara secara eksklusif. Kedua, kerjasama regional, yang mencakup beberapa negara dalam suatu wilayah tertentu. Ketiga, kerjasama multilateral, yang melibatkan banyak negara dan sering kali diatur melalui organisasi internasional atau perjanjian global. Keempat, kerjasama internasional secara umum, yang dapat mencakup berbagai kombinasi dan bentuk kerjasama antarnegara di atas di berbagai tingkatan dan sektor (Purwanto & Wati, 2019).

Dalam era globalisasi saat ini, sangat penting bagi negara-negara di seluruh dunia untuk menjalin kerjasama antarnegara. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan pembangunan domestik, dan memulihkan kondisi ekonomi. Dalam konteks internasional, negara-negara tidak dapat secara mandiri memenuhi semua kebutuhannya tanpa bantuan kerjasama dengan negara lain, karena tidak ada negara yang sepenuhnya mandiri dalam memenuhi seluruh kebutuhannya. Oleh karena itu, kerjasama antarnegara menjadi esensial bagi



negara untuk mencapai kebutuhan nasional mereka. Menurut Keohane, kerjasama internasional terjadi ketika aktor-aktor (negara) berada dalam situasi yang mendorong mereka untuk mencapai kepentingan bersama. Milner (1992)

menambahkan bahwa dalam kerjasama internasional terdapat dua elemen penting: pertama, aktor diarahkan untuk mencapai tujuan yang mungkin berbeda antar negara; kedua, kerjasama harus memberikan keuntungan dan manfaat yang bersifat timbal balik, meskipun hasil yang diperoleh oleh setiap aktor, baik negara maupun non-negara, tidak harus identik.

Dalam konteks ini, kerjasama bilateral merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional yang dilakukan secara eksklusif antara dua negara untuk mencapai kepentingan bersama. Bentuk kerjasama ini memungkinkan negara-negara yang terlibat untuk bernegosiasi secara lebih fleksibel dibandingkan dengan kerjasama multilateral, karena hanya melibatkan dua pihak, kerjasama bilateral dapat diatur secara lebih spesifik dan terarah yang memungkinkan implementasi kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Hubungan bilateral sering kali mencakup perjanjian di bidang ekonomi, politik, dan sosial yang mengikat kedua negara untuk bekerja sama dalam berbagai sektor yang disepakati bersama.

Dalam konteks kerjasama bilateral, bidang ekonomi menjadi salah satu fokus utama yang mencakup perdagangan, investasi, dan sektor-sektor strategis lainnya. Kerjasama bilateral di bidang ekonomi memungkinkan negara-negara untuk meningkatkan perdagangan internasional, mengurangi hambatan tarif, meningkatkan arus investasi, serta memperkuat pertukaran teknologi dan pengetahuan. Melalui

1 bilateral, negara-negara dapat membuka akses pasar, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas peluang investasi di sektor-sektor strategis. Hubungan ekonomi ini, negara-negara yang bekerja sama berusaha untuk



mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki dan memperkuat daya saing mereka di pasar internasional.

Kerjasama bilateral di bidang ekonomi sering kali mencakup berbagai sektor penting, seperti perdagangan komoditas, investasi di sektor manufaktur dan infrastruktur, serta pengembangan teknologi. Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama ini dapat saling memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing, misalnya dalam produksi dan ekspor komoditas tertentu, atau dalam investasi lintas batas. Selain itu, sektor-sektor lain seperti pariwisata, energi, dan infrastruktur juga sering menjadi fokus dalam kerjasama ekonomi bilateral, membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Meskipun kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi menawarkan banyak manfaat, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan regulasi dan kebijakan ekonomi antara kedua negara, yang dapat menciptakan hambatan dalam perdagangan dan investasi. Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama ini sering kali harus melakukan penyesuaian dalam regulasi dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan memastikan bahwa hambatan-hambatan perdagangan dapat diatasi. Selain itu, risiko ketidaksetaraan dalam pembagian keuntungan juga dapat muncul, di mana satu pihak mungkin memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan pihak lainnya. Oleh karena itu, penting bagi

negara untuk memastikan bahwa perjanjian bilateral tersebut adil dan saling menguntungkan.



Secara keseluruhan, kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi merupakan alat yang efektif untuk memperkuat hubungan antarnegara. Melalui perjanjian yang mengurangi hambatan perdagangan dan mendorong investasi, kerjasama ini memberikan manfaat yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat. Namun, keberhasilan kerjasama ini bergantung pada kemampuan negara-negara untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kerjasama tersebut dapat dirasakan secara adil oleh semua pihak yang terlibat.

